

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**



**DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Reancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Koperasi & UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi untuk periode Tahun 2021 dapat diselesaikan. RENJA merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama antara pimpinan dan stakeholders terkait mengenai kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan mempertimbangan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagi kecenderungan perubahan lingkungan strategis yang sedang dan akan berlangsung selama 5 tahun. RENJA adalah faktor dasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkannya semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar Penyelenggaraan program dan kegiatan Disdagkoperin Kota Cimahi menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2021 ini, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal Maret 2021

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan Perindustrian

DADAN DARMAWAN, S.SOS., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720130 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	8
2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2020 dan Capaian Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi	8
2.2	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdagkoperin Kota Cimahi	19
2.3	Analisis Kinerja Pelayanan di Disdagkoperin	27
2.4	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja	34
3.3	Program dan Kegiatan	39
BAB IV	PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan salah satu tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rancangan Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan adalah suatu aktivitas terencana yang sangat penting dan dilakukan oleh suatu organisasi publik dalam rangka mempertahankan eksistensi dan konsistensi guna menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang dinamis dan kompleks. Kegiatan perencanaan ini menghasilkan dokumen perencanaan organisasi yang menjadi dasar dilaksanakannya program dan kegiatan organisasi.

Pentingnya menyusun sebuah dokumen Renja memungkinkan organisasi untuk menetapkan prioritas dan memanfaatkan berbagai peluang, menjadi kerangka kerja untuk meningkatkan kekuatan dan kesempatan, memperbaiki kekurangan, dan mengatasi ancaman melalui koordinasi dan pengendalian aktivitas,

meminimalkan pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan, memungkinkan keputusan utama yang lebih baik dalam mendukung sasaran yang telah ditentukan, memungkinkan alokasi sumber daya secara efektif dan efisien dan menyediakan pendekatan kerjasama, terpadu dan antusias dalam menangani masalah organisasi guna mencapai tujuan.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, disertai dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menjadi dasar terbentuknya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi yang sebelumnya berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian Kota Cimahi. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2021, maka disusunlah Renja Dinas Tahun 2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja ini tentu saja memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal penting dan strategis dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, dimana salah satu prioritas pembangunan dalam bidang ekonomi pada RPJMD tersebut adalah menciptakan pembangunan ekonomi berbasis pada potensi lokal dengan pendekatan klaster industri, dimana perencanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Cimahi.

Dokumen Renja Disdagkoperin tahun 2021 akan dijadikan landasan dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2021 yang menjadi rujukan untuk rancangan APBD Tahun Anggaran 2021. Disamping itu, Renja Disdagkoperin harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja harus dituangkan dan dipertimbangkan sebagai dasar yuridis penyusunan Renja sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Disdagkoperin. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 32 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penukutan dan Pengembangan Sentra Kecil dan Menengah Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penukutan dan Pengembangan Sentra Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.189-Huham/2020 Tentang Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
21. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 255);
22. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
23. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Cimahi Nomor 050/ /Kep. Disdagkoperin/2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dewasa ini banyak persoalan yang dialami berbagai organisasi pemerintah, termasuk di pemerintah daerah karena lemahnya manajemen administrasi pemerintahannya. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah ketidak-jelasan dan akuntabilitas dalam fungsi perencanaan, khususnya perencanaan program dan kegiatan dalam sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat, sehingga publik masih mempertanyakan akuntabilitasnya. Dampak yang terjadi kemudian adalah bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja organisasi pemerintah di daerah belum optimal dirasakan oleh masyarakat, bahkan terkesan buruk.

Argumentasi tersebut di atas, kiranya menjadi pemicu dan landasan serta motif awal Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian yang bermaksud untuk menyusun Rencana Kerja. Maksud yang paling utama penyusunan Renja ini adalah agar Dinas memiliki suatu pedoman atau kompas yang jelas, terukur dan terarah

dalam mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian secara khusus dan Kota Cimahi pada umumnya, maka beberapa tujuan penting berikut dapat dilakukan, yaitu:

1. Menjadi dasar bagi Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian dalam menetapkan prioritas dan berbagai rencana program dan kegiatan yang strategis dengan memanfaatkan peluang yang ada serta berbagai keunggulan internal Dinas guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara khusus dan visi dan misi Wali Kota Cimahi;
2. Menjadi landasan atau pedoman kerja bagi Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian ke depan, sehingga berbagai keputusan penting dan utama dapat dilakukan dengan lebih terarah dan fokus guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;
3. Mengantisipasi dan meminimalisir berbagai pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan bagi Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian dalam melaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan yang telah disusun;
4. Menjadi kerangka kerja bagi pimpinan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian untuk melakukan koordinasi dan pengendalian aktivitas selama satu tahun ke depan dalam berbagai program dan kegiatan;
5. Memungkinkan bagi setiap pihak di Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian, khususnya pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien;
6. Menjadi acuan untuk melakukan aktivitas kepemimpinan khususnya dalam menerapkan pendekatan kerjasama yang terpadu dan antusias dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan serta menangani berbagai masalah yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan rencana program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
7. Berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan Kota Cimahi yang lebih baik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDAGKOPERIN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2020) dan capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdagkoperin
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Fungsi Disdagkoperin
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Disdagkoperin
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDAGKOPERIN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan pada Renja tahun 2020 merupakan dasar perencanaan untuk tahun anggaran 2021. Berdasarkan evaluasi terhadap hasil kinerja yang dapat diukur secara akuntabilitas pada program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah Evaluasi Program Kegiatan tahun 2020 yang menjadi barometer dan tindak lanjut di tahun selanjutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi pada tahun 2020 telah melaksanakan 21 program dan 45 Kegiatan. Adapun Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 19.398.303.240 Rp. 19.398.303.240,-. Telah terealisasi sebesar Rp. 16.912.012.512,- atau sebanyak 87,18% dari total Pagu Anggaran Belanja Daerah. Pada tahun anggaran 2021, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi direncanakan akan melaksanakan 51 sub kegiatan 25 kegiatan dalam 16 program. Untuk capaian kinerja kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi pada tahun 2020 dapat ditinjau lebih lanjut di tabel 2.1.

No	Sasaran	Urusan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	Target Renstra			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	
													I		II		III		IV							
1	2		3		4		5			7			8		9		10		11	12		13=6+12	14=(13/5)x100%	15		
							K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil;	FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI DAN BISNIS	jumlah peserta pelatihan WUB	110	Tenant/Orang	147974913	110	Tenant/Orang	172.253.100	0	8.703.600	35	77.460.060	0	129.048.980,00	80	149.435.780	73%	149.435.780	(22.817.320)			
2		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil;	FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI DAN BISNIS	jumlah WUB	2	WUB	147974913	2	WUB	226.106.400	0	8.703.600	0	77.460.060	0	129.048.980,00			0000	215,212,640				
3		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil; Jumlah Wirausaha Baru;	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	jumlah UKM yang mendapat fasilitasi izin	720	UMKM	190663419	720	UMKM	327.491.840	360	105.325.600	360	106.190.060	0	250.080.980,00			00360360	461,596,640				
4		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil; Jumlah Wirausaha Baru;	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	jumlah UKM yang mendapat fasilitasi labeling	10	UMKM	190663419	10	UMKM	327.491.840	5	105.325.600	5	106.190.060	0	250.080.980,00			0055	461,596,640				
5		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil; Jumlah Wirausaha Baru;	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	jumlah UKM yang mengikuti akselerasi	400	UMKM	190663419	400	UMKM	327.491.840	0	105.325.600	260	106.190.060	0	250.080.980,00	140		002600	461,596,640				

6		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENGEMBAN GAN KEWIRAUSA HAAN DAN KEUNGGULA N KOMPETTIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil;	FASILITA SI PENINGK ATAN KEMITRA AN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENG AH	Jumlah UKM yang bermitra dengan industri/usa ha besar	20	UMKM		20	UMKM	80.304.000,00	0	0	0	0	0,00	2.040.000		0000	0	78.264.000	
7		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENGEMBAN GAN KEWIRAUSA HAAN DAN KEUNGGULA N KOMPETTIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil;	PEMETAA N DAN PENDATA AN UKM	Monev pendampin gan UKM	2	Kali	66140661	2	Kali	156.593.900	1	7.072.000	1	95.310.000	0	151.582.000,00		152.122.000	0011	253,964,000	
8		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENGEMBAN GAN KEWIRAUSA HAAN DAN KEUNGGULA N KOMPETTIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil;	PEMETAA N DAN PENDATA AN UKM	Tersedinya data/profil UKM	1	Dokume n	66140661	1	Dokume n	176.426.000	0	7.072.000	0	95.310.000	0	151.582.000,00			0000	253,964,000	
9		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENGEMBAN GAN KEWIRAUSA HAAN DAN KEUNGGULA N KOMPETTIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil;	PENYELE NGGARA AN PELATIHA N KEWIRAU SAHAAN	jumlah UKM pemula yang mengikuti pelatihan	400	UMKM	76599669	400	UMKM	237.620.000	0	0	45	85.569.900	0	208.169.900,00			0045 0	236.019.900	
10		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PEMBINA AN, PENGAW ASAN DAN PENGHAR GAAN KOPERASI BERPRES TASI	Coaching klinik koperasi	30	KOPER ASI	478624775	30	KOPER ASI	596.419.000	0	15.696.000	30	44.950.400	0	150.367.100,00			0030 0	211,013,500	
11		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PEMBINA AN, PENGAW ASAN DAN PENGHAR GAAN KOPERASI BERPRES TASI	Fasilitasi pembentuka n badan usaha koperasi	0	KOPER ASI	478624775	0	KOPER ASI	596.419.000	0	15.696.000	0	44.950.400	0	150.367.100,00			0000	211,013,500	

12		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PEMBINA AN, PENGAW ASAN DAN PENGHAR GAAN KOPERASI BERPRES TASI	Jumlah Koperasi yang dilatih	30	KOPER ASI	478624775	30	KOPER ASI	596.419.000	30	15.696.000	30	44.950.400	0	150.367.100,00			0030 30	211,013,500		
13		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PEMBINA AN, PENGAW ASAN DAN PENGHAR GAAN KOPERASI BERPRES TASI	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi	30	KOPER ASI	478624775	30	KOPER ASI	596.419.000	0	15.696.000	30	44.950.400	0	150.367.100,00			0030 0	211,013,500		
14		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PEMBINA AN, PENGAW ASAN DAN PENGHAR GAAN KOPERASI BERPRES TASI	Jumlah Peserta (masyarakat) sosialisasi perkoperasi an	100	Orang	478624775	100	Orang	596.419.000	0	15.696.000	100	44.950.400	0	150.367.100,00			0010 00	211,013,500		
15		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PEMETAA N DAN PENDATA AN KOPERASI	Kajian terkait koperasi	1	Dokume n	159932762	1	Dokume n	161.552.700	0	16.638.900	0	35.740.000	0	60.992.700,00			0000	113,371,600	71.929.900	
16		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PEMETAA N DAN PENDATA AN KOPERASI	Pendataan koperasi	100	KOPER ASI	159932762	100	KOPER ASI	161.552.700	100	16.638.900	100	35.740.000	0	60.992.700,00			0010 0100	113,371,600		
17		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PENGEMB ANGAN DAN PEMELIH ARAAN SISTEM INFORMA SI KOPERASI	jumlah Koperasi yang dilatih	10	KOPER ASI	60000000	10	KOPER ASI	205.728.100	0	1.080.000	10	10.710.000	0	13.770.000,00			0010 0	36.618.200	204.478.200,00	1.249.90 0,00
18		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PENGEMB ANGAN DAN PEMELIH ARAAN SISTEM INFORMA SI KOPERASI	Pembuatan Aplikasi	1	Aplikasi	60000000	1	Aplikasi	263.713.100	0	1.080.000	0	10.710.000	0	13.770.000,00			0000	25,560,000		

		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PENGEMB ANGAN DAN PEMELIH ARAAN SISTEM INFORMA SI KOPERASI	Penambah an Modul Aplikasi	0	Modul	60000000	0	Modul	263.713.100	0	1.080.000	0	10.710.000	0	13.770.000,00			0000	25,560,000		
20		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PENINGK ATAN DAN PENGEMB ANGAN JARINGA N KERJASA MA USAHA KOPERASI	Jumlah MoU kerjasama usaha koperasi	2	MoU	76714000	2	MoU	25.464.200	0	0	0	0	0,00			0000	5.710.000	23.614.200	(1.850.0 00)	
21		KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENG AH	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELEMBAGA AN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PENINGK ATAN POLA USAHA KOPERASI	jumlah koperasi yang memiliki pola usaha baru	5	KOPER ASI	130718455	5	KOPER ASI	207.139.200	0	0	0	63.623.000	5	104.979.900,00			0500	171.079.900	175.279.900	(31.859. 300)
22		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase ASN Yang Dibina;	PENGEMB ANGAN KAPASIT AS SUMBERD AYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina	69	Orang	244068200	69	Orang	202.118.200	0	0	0	116.121.700	0	116.121.700,00			0000	232,243,400		
23		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase ASN Yang Dibina;	PENGEMB ANGAN KAPASIT AS SUMBERD AYA PEGAWAI	jumlah THL yang dilatih	112	Orang	244068200	112	Orang	202.118.200	0	0	112	116.121.700	0	116.121.700,00			0011 20	232,243,400		
24		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Realisasi Anggaran;	PENYUSU NAN LAPORAN INVENTA RIS BARANG	jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	14	Dokume n	15375000	14	Dokume n	15.375.000	0	11.500.000	7	0	3	11.500.000,00			0370	23,000,000		
25		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Realisasi Anggaran;	PENYUSU NAN LAPORAN KEUANG AN	jumlah dokumen Laporan Keuangan	3	Dokume n	33507000	3	Dokume n	32.232.600	0	0	0	1.620.000	1	6.665.000,00			0100	8,285,000		

26		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LAKIP;	PENYUSU NAN MONITOR ING DAN EVALUAS I PELAKSA AN KEGIATA N, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen LKIP	1	Dokume n	242641000	1	Dokume n	620.534.000	1	32.945.200	1	18.243.600	0	59.000.800,00			0011	110,189,600		
27		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LAKIP;	PENYUSU NAN MONITOR ING DAN EVALUAS I PELAKSA AN KEGIATA N, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen LPPD	1	Dokume n	242641000	1	Dokume n	620.534.000	1	32.945.200	1	18.243.600	0	59.000.800,00			0011	110,189,600		
28		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LAKIP;	PENYUSU NAN MONITOR ING DAN EVALUAS I PELAKSA AN KEGIATA N, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen monev	6	Dokume n	242641000	6	Dokume n	620.534.000	1	32.945.200	2	18.243.600	3	59.000.800,00			0321	110,189,600		
29		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LAKIP;	PENYUSU NAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENJA	2	Dokume n	210261000	2	Dokume n	153.861.600	1	28.529.200	0	23.739.000	0	68.192.600,00			0001	120,460,800		
30		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LAKIP;	PENYUSU NAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENSTRA	0	Dokume n	210261000	0	Dokume n	153.861.600	0	28.529.200	0	23.739.000	0	68.192.600,00			0000	120,460,800		
31		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LAKIP;	PENYUSU NAN STANDAR PELAYAN AN OPERASIO NAL DAN PROSEDUR PD	jumlah SOP	15	Dokume n	76875000	15	Dokume n	64.224.400	7	26.208.025	2	7.779.875	6	39.256.475,00			0627	73,244,375		

32		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi;	KOORDIN ASI DAN KONSULT ASI KEDINAS AN	jumlah perjalanan caraka	156	Hari	1149174300	156	Hari	1.200.992.150	0	47.000.036	0	187.450.869	0	366.507.838,00			0000	600,958,743		
33		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi;	KOORDIN ASI DAN KONSULT ASI KEDINAS AN	jumlah perjalanan dinas	104	Kali	1149174300	104	Kali	1.200.992.150	10	47.000.036	24	187.450.869	49	366.507.838,00			0492 410	600,958,743		
34		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN KENDARA AN DINAS	jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	32	Unit	580913600	32	Unit	2.051.991.280	0	102.550.410	0	110.338.410	0	305.266.804,00			0000	518,155,624		
35		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN KENDARA AN DINAS	jumlah kendaraan yang dipelihara	34	Unit	580913600	34	Unit	2.051.991.280	6	102.550.410	6	110.338.410	14	305.266.804,00			0146 6	518,155,624		
36		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN MEUBELE UR KANTOR	jumlah kursi	30	Buah	399259140	30	Buah	224.810.300	0	0	0	0	0	0,00			0000	0		
37		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN MEUBELE UR KANTOR	jumlah lemari	6	Unit	399259140	6	Unit	224.810.300	0	0	0	0	0	0,00			0000	0		
38		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN MEUBELE UR KANTOR	jumlah meja	30	Unit	399259140	30	Unit	224.810.300	0	0	0	0	0	0,00			0000	0		
39		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN MEUBELE UR KANTOR	jumlah set partisi	3	Set	399259140	3	Set	224.810.300	0	0	0	0	0	0,00			0000	0		
40		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN PERALAT AN KANTOR	jumlah unit ac	6	Unit	808280300	6	Unit	551.546.943	0	10.885.000	0	36.000.000	0	54.915.000,00			0000	101,800,000		
41		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN PERALAT AN KANTOR	jumlah unit komputer	25	Unit	808280300	25	Unit	551.546.943	5	10.885.000	6	36.000.000	2	54.915.000,00			0265	101,800,000		

42		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN PERALAT AN KANTOR	jumlah unit printer	10	Unit	808280300	10	Unit	551.546.943	2	10.885.000	3	36.000.000	0	54.915.000,00			0032	101,800,000		
43		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN DAN PEMELIH ARAAN PERALAT AN KANTOR	jumlah unit server	3	Unit	808280300	3	Unit	551.546.943	0	10.885.000	0	36.000.000	0	54.915.000,00			0000	101,800,000		
44		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADA AN SERAGAM PEGAWAI	jumlah set seragam pegawai	69		68675000	69		68.675.000	0		0		0				0000			
45		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENYEDI AAN ALAT TULIS KANTOR	jumlah bulan penyediaan ATK	12	Bulan	119695270	12	Bulan	199.996.719	3	97.745.600	3	0	3	174.395.500,00			0333	272,141,100		
46		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENYEDI AAN GUDANG KANTOR	jumlah gudang	1	Unit	66600000	1	Unit	66.600.000	0	0	0	0	0	0,00			0000	0		
47		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENYEDI AAN JASA JAMINAN KESEHAT AN DAN KETENAG AKERJAA N	jumlah bulan THL yang diasuransik an	112	Orang	40590000	112	Orang	85.658.540	27	3.980.453	27	7.748.694	27	18.457.841,00			0272 727	30,186,988		
48		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENYEDI AAN JASA KEBERSIH AN KANTOR	jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	82280000	12	Bulan	76.861.400	3	18.240.570	3	16.838.850	3	49.121.070,00			0333	84,200,490		
49		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENYEDI AAN JASA KOMUNIK ASI, LISTRIK DAN AIR	jumlah bulan jasa komunikasi	12	Bulan	181930000	12	Bulan	181.930.000	3	80.864.787	3	1.774.806	3	83.878.474,00			0333	166,518,067		
50		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi;	PENYEDI AAN MAKANAN DAN MINUMA N	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	118900000	12	Bulan	118.900.000	3	8.241.000	3	13.183.000	3	26.366.000,00			0333	53.858.000	53.042.000	106.900. 000
51		PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENYEDI AAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGAN DAAN	jumlah bulan penggandaan	12	Bulan	94300000	12	Bulan	141.950.000	3	58.315.000	3	33.337.400	3	97.367.500,00			0333	189,019,900		

52			PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENYEDI AAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGA N DAAN	jumlah bulan penyediaan media informasi	12	Bulan	94300000	12	Bulan	141.950.000	3	58.315.000	3	33.337.400	3	97.367.500,00			0333	189,019,900		
53			PENDUKU NG PEMERIN TAHAN	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENYEDI AAN PERALAT AN RUMAH TANGGA	jumlah set peralatan rumah tangga	6	Set	28460000	6	Set	32.460.000	0	0	1	8.509.000	0	8.509.000,00			0010	17,018,000		
54			PERDAGA NGAN	PROGRAM KERJASAMA PENINGKAT AN POTENSI SUMBER DAYA PERDAGANG AN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang; Prosentase Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Paham Aturan / Tata Tertib;	PEMBINA AN KELOMPO K PEDAGAN G INFORMA L	Jumlah Kelompok Pedagang informal Yang Dibina	4	Kelomp ok	330000000	4	Kelomp ok	64.234.600	1	24.980.000	0	978.000	2	25.958.000,00			0201	31.898.000	62.771.400	(1.463.2 00)
55			PERDAGA NGAN	PROGRAM PEMBENTUK AN SENTRA JASA/PERDA GANGANN	Jumlah Sentra Jasa Dan Perdagangan;	KAJIAN PEMBENT UKAN DAN PENGEMB ANGAN SENTRA JASA/ PERDAGA NGAN	Dokumen kajian	1	Dokume n	75000000	1	Dokume n	66.588.400	0	0	0	0	0,00			0000	4.860.000	61.728.400		
56			PERDAGA NGAN	PROGRAM PENINGKAT AN DAN PENGEMBAN GAN EKSPOR DAERAH	Prosentase Kenaikan Omset Pedagang Selama Mengikuti Pameran Promosi;	PENINGK ATAN DAN PENGEMB ANGAN EKSPOR DAERAH	Jumlah UKM/ IKM Yang Diikut- sertakan Dalam Event Pameran Promosi Tingkat Lokal, Regional Dan Nasional	53	UKM/ IKM	330000000	53	UKM/ IKM	154.715.000	0	1.800.000	8	25.590.000	12	30.675.000,00			0128 0	80.303.000	146.423.000	6612000 0
57			PERDAGA NGAN	PROGRAM PENINGKAT AN EFISIENSI PERDAGANG AN DALAM NEGERI	Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM; Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi; Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional; Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	OPERASIO NAL UPTD PASAR KOTA CIMAHI	Pembiayaan Kegiatan Operasional UPTD Pasar Kota Cimahi	4	Pasar Rakyat	1054467505	4	Pasar Rakyat	3.794.375.123	1	807.293.845	1	1.031.503.798	1	2.296.946.187,00			0111	3.212.582.043		

58		PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM; Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi; Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional; Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT	Penataan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar	1	Pasar Rakyat	2899785640	1	Pasar Rakyat	2.570.038.858	0	36.767.600	0	52.399.000	0	765.902.400,00			0000	855.069.000	1.944.942.700	625.096.158
59		PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	PENGELOLAAN PERGUDANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG	Jumlah pengelolaan Pergudangan Yang Teridentifikasi	10	Unit Gudang	26361688	10	Unit Gudang	10.953.200	0	0	0	1.170.000	0				0000	1.170.000	10.953.200	
60		PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM; Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi; Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional; Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PASAR MODERN DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	Rekomendasi IUTM Dalam Pengendalian Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Pasar Rakyat	68	Rekomendasi	29525090	68	Rekomendasi	27.096.500	0	2.341.500	0	1.962.900	2	4.304.400,00			0200	6.314.400	11.314.400	(20.782.100)
61		PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM; Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi; Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional; Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN	Terpromosikannya Produk Yang Berpotensi Ekspor	35	Produk	54305077	35	Produk	211.112.540	0	9.250.660	0	25.977.000	20	60.815.360,00			02000	81.974.260	189.898.260	(129.138.280)
62		PERDAGANGAN	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi;	OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH	Terlaksananya Tera Ulang Terhadap UPTP Dalam Transaksi Perdagangan Dalam Mendukung Terciptanya Pasar Tertib Ukur	650	UTTP	3762326438	650	UTTP	676.580.400	271	114.682.460	250	273.434.360	595	437.057.360,00			1740	530.135.940		(146.444.460)

63		PERDAGANGAN	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi;	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	Terpantaunya Barang Kebutuhan Pokok Di Masyarakat	4	Pasar Rakyat	31173562	4	Pasar Rakyat	177.366.900	0	1.350.000	1	60.729.800	3	72.219.800,00			0310	73.623.800	122.507.200	(54.859.700)
64		PERINDUSTRIAN	PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	Jumlah Sentra Industri Pengolahan;	KAJIAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	Dokumen kajian	2	Dokumen	150000000	2	Dokumen	98.868.580	0	0	0	0	0	0,00			0000	9.231.800	71.986.780	
65		PERINDUSTRIAN	PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	Jumlah Sentra Industri Pengolahan;	PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	Jumlah Sentra yang terbentuk dan dikembangkan	2	Sentra	150000000	2	Sentra	-	0	0	0	0	0	0,00			0000	0		
66		PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu;	FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA	Jumlah IKM Yang Difasilitasi	120	IKM	300000000	120	IKM	379.417.790	0	21.033.800	60	204.773.600	62	270.657.400,00			062600	370.657.400	370.657.400	
67		PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu;	PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLUSTER INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	Jumlah Pelaku IKM Klaster Non Makanan dan Minuman yang mendapatkan pelatihan	160	IKM	320000000	160	IKM	659.378.200	0	32.753.175	30	126.882.725	175	233.337.050,00			0175300	451.097.425	585.653.425	134.556.000
68		PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu;	PEMBINAAN KETERKAITAN INDUSTRI INDUSTRI HULU HINGGA KE HILIR	Terselenggaranya pertemuan antara IKM dengan Perusahaan Swasta	1	Kali	150000000	1	Kali	145.757.200	0	0	1	106.120.400	0	106.120.400,00			0010	109.455.200	124.622.200	

69		PERINDUS TRIAN	PROGRAM PENGEMBAN GAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu;	PEMBINA N KEMAMP UAN, PENGEMB ANGAN DAN PELAYAN AN TEKNOLO GI INDUSTRI	Jumlah Pelaku IKM Klaster Makanan dan Minuman yang mendapat pelatihan	140	IKM	280000000	140	IKM	276.907.850	45	104.526.440	5	6.843.200	120	132.035.040,00			0120 545	226.599.040	257.029.040			
70		PERINDUS TRIAN	PROGRAM PENGEMBAN GAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu;	PENDUKU NG OPERASIO NAL TECHNOP ARK KOTA CIMAHI	Jumlah event terkait pengemban gan UKM/IKM yang dilaksanaka n di Technopark	12	Bulan	4.128.343.380, 00	12	Bulan	4.128.343.380	3	659.735.371	3	1.029.976.996	3	2.185.971.543,00	3		0333	3.354.426.795	3.709.037.765			
71		PERINDUS TRIAN	PROGRAM PENGEMBAN GAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu;	PENGEMB ANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLO GI INDUSTRI	Jumlah modul yang dikembang kan	1	Modul	60000000	4	Modul	96.250.000	0	2.100.000	3	65.469.000	1	73.769.000,00			0130	77.019.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																										

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdagkoperin

Isu strategis Kota Cimahi yaitu : percepatan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi. Optimalisasi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Optimalisasi peran sektor industri kecil menengah, perdagangan dalam perekonomian daerah. Yang menjadi prioritas pembangunan sektor ekonomi tahun 2021 yaitu : pengembangan kewirausahaan, revitalisasi pasar tradisional, peningkatan daya saing industri melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Peningkatan kualitas perdagangan *online*.

Disdagkoperin merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi tersebut Disdagkoperin memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian. Tugas pokok yang diharapkan bisa semakin fokus pada bidang kerjanya dan tentunya memiliki tanggungjawab yang luas dan kompleks, mengingat urusan dan masalah publik terkait bidang-bidang tersebut juga sangat banyak dan kompleks pula.

Tahun 2021 merupakan tahun kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh terkendalinya pandemi dan meluasnya distribusi vaksin yang dijadwalkan akan selesai di bulan Maret 2021 dan diharapkan tercapai Herd Immunity. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor dan industri pengolahan. Sementara sektor jasa yang terkena dampak besar akibat covid 19 akan mengalami akselerasi. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan, untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dimana investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi pengangguran pasca pandemi, dan ekspor akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.

Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi hal tersebut maka Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi melakukan beberapa langkah strategis.

Meskipun demikian, sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban maka Disdagkoperin mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara legal-formal dalam Peraturan yang ada, maka sebagai suatu organisasi perangkat daerah, Disdagkoperin tentunya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam mengemban amanahnya mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian.

Selanjutnya, dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi dari Disdagkoperin, maka Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang. Hal itu sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk diketahui bahwa Disdagkoperin memiliki bidang-bidang kerja sebagai berikut:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perdagangan
- c. Bidang Koperasi dan UKM
- d. Bidang Perindustrian
- e. UPTD Pasar
- f. UPTD Technopark
- g. UPTD Metrologi Legal

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Disdagkoperin Kota Cimahi menemukan hambatan/ kendala antara lain:

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Perdagangan

a. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

- 1) Kota Cimahi yang tidak mempunyai lahan pertanian dan peternakan yang signifikan, memerlukan pasokan bahan pokok dari daerah sekitar, khususnya di wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat). Sehingga kejadian-kejadian penting yang terjadi di 3 daerah tersebut akan berdampak/ terjadi juga di Kota Cimahi. Contohnya: Adanya kelangkaan dan/ atau kenaikan harga barang pokok.
- 2) Kejadian yang selalu berulang setiap tahun yaitu adanya kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya keagamaan, khususnya Idul Fitri. Selain itu, faktor-faktor yang menjadikan kenaikan/ kelangkaan barang yaitu adanya bencana alam, anomali cuaca, dan ada tindakan-tindakan dari pelaku usaha yang menahan distribusi barang.
- 3) Pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen terkait masa kedaluarsa, kehalalan produk (kasus Mie Samyang), dan isi kandungan bahan makanan (kasus cacing pada produk ikan Mackerel dalam kemasan).

- 4) Masih dilakukannya pendistribusian terbuka sehingga ada beberapa Rumah Tangga Sasaran yang belum mendapatkan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi.
- 5) Semakin maraknya ritel berupa minimarket yang perlu diawasi perkembangannya, terutama terkait perizinan, jam operasional, dan jarak antar minimarket.
- 6) Belum tertibnya pelaku usaha informal (Pedagang Kaki Lima dalam menggelar dagangannya), di mana tempat/ lokasi yang disediakan tidak atau belum menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan oleh para pedagang informal tersebut.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan

- 1) Terbatasnya lahan di Kota Cimahi untuk dijadikan pasar tradisional yang memenuhi syarat yang mudah-mudahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Maraknya super market yang dapat menjadi pesaing pasar tradisional sehingga perlu adanya perlindungan bagi pedagang pasar tradisional dari persaingan konsumen yang cenderung lebih memilih berbelanja di super market.

c. Unit Pelayanan Teknis Kemetrolagian

- 1) Perpindahan Kewenangan Pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap UTPP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan **amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** yang akan berimplikasi terhadap fokus Pemerintah Daerah Kota termasuk persiapan SDM dan anggaran (penyediaan sarana dan prasarana kemetrolagian);
- 2) Kekhawatiran akan terjadinya stagnansi pelayanan kemetrolagian mengingat per tanggal 2 Oktober 2016, seluruh cap tanda tera, cap pegawai berhak dan Sarana Prasarana yang ada pada Pemerintah Provinsi harus diserahkan kembali ke Pemerintah Pusat melalui Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota baru

- sebagian kecil yang telah mampu melaksanakan pelayanan kemetrolagian sendiri;
- 3) Peranan pengguna alat UTTP merupakan hasil akhir dalam menentukan jumlah, ukuran, takaran, dan timbangan sehingga komoditi yang diserahkan dapat dipercaya konsumen baik dalam maupun luar negeri serta Peranan SDM dalam melakukan pengujian alat UTTP sejalan dengan kemajuan teknologi dimana terdapat berbagai peralatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda diperlukan SDM yang profesional di dalam bidangnya;
 - 4) Sulitnya menyediakan SDM Kemetrolagian yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Perdagangan, sementara untuk operasional UPT Kemetrolagian disyaratkan jumlah minimal SDM yang harus dimiliki sebanyak 4 orang.

d. Unit Pelayanan Teknis Pasar

Belum optimalnya pelayanan kepada konsumen agar belanja dengan aman, nyaman dan tentram di pasar tradisional yang semi modern sehingga tidak kalah bersaing dengan super market.

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Seksi Koperasi

- 1) Terbatasnya SDM koperasi (Pengawas, pengurus dan anggota) baik secara kualitas dan kuantitas yang memahami peran dan fungsi koperasi sebagai badan usaha yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga masih dipandang sebelah mata dan sulitnya pengembangan usaha koperasi di sektor riil;
- 2) Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sesuai regulasi koperasi dalam pengelolaan koperasinya;
- 3) Kurangnya pemahaman dan motivasi pengurus, pengawas, anggota dan pengelola dalam meningkatkan akuntabilitas

- kinerja pengelolaan perkoperasian dan mendapatkan progres kinerja yang dapat memacu perkembangan lembaga koperasi;
- 4) Banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus koperasi yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi.

b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusanannya serta legalisasi produk umkm nya;
- 2) UMKM menghadapi kendala dalam hal akses pembiayaan. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank). Sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional -meskipun dengan beban dan resiko yang cukup memberatkan- demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya;
- 3) Terbatasnya akses pemasaran dan akses informasi, yang menyebabkan banyaknya produk umkm yang potensial yang hanya beredar di pasar lokal;
- 4) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha dalam pengelolaan usaha dari mulai orientasi usaha, pengetahuan, dan keterampilan, kemauan dan kemampuan peningkatan skala usaha;
- 5) Kurangnya tenaga pendamping di lapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Tenaga pendamping ini berfungsi untuk pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka;
- 6) Belum terdapat perkembangan yang signifikan jumlah wirausaha pada klaster telematika, khususnya yang menggunakan fasilitas gedung BITC;

- 7) Sinertigas antar kelembagaan UMKM belum berfungsi secara maksimal (komunitas, klaster dan sentra).

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Perindustrian

a. Seksi Perindustrian Agro

- 1) Terbatasnya kemampuan inovasi, diversifikasi produk dan pengembangan produk unggulan, pengetahuan manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja. Hal ini memerlukan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk desiminasi dan layanan konsultasi, cetak desain merk dan kemasan produk makanan dan minuman, mengembangkan festival seleksi *food ethnic*, festival makanan dan minuman halal serta uji nilai nutrisi dan umur simpan produk makanan dan minuman Kota Cimahi;
- 2) Belum optimalnya diversifikasi olahan pangan, pemahaman legalitas usaha, legalitas produk, manfaat legalitas, mutu produk, standardisasi dan sertifikasi produk yang membutuhkan validitas pengawasan dan pengujian produk. Hal ini memerlukan pembinaan dengan cara melakukan workshop diversifikasi olahan pangan, workshop *Good Manufacturing Practices* (GMP), Gugus Kendali Mutu (GKM) dan peningkatan standar mutu produk bagi pelaku IKM makanan dan minuman (PIRT, Laik Sehat, Sertifikat Halal, HAKI);
- 3) Terbatasnya penguasaan teknologi dan pemahaman *Green Industry*, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong dan bahan tambahan pangan. Hal ini memerlukan peningkatan kemampuan, pengembangan dan pelayanan teknologi industri;
- 4) Belum optimalnya pertumbuhan, penataan dan pemetaan kawasan industri di Kota Cimahi. Hal ini untuk Industri Kecil dan menengah perlu membuat kajian pembentukan dan pengembangan sentra industri pengolahan yang diawali dari kajian potensi sentra industri pengolahan.

b. Seksi Perindustrian Non Agro

- 1) Penataan struktur industri berbasis potensi lokal;
- 2) Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara pelaku usaha IKM dengan sesama Pelaku Usaha IKM serta pelaku Usaha IKM dengan Industri Besar;
- 3) Pemberian fasilitas usaha dalam pengembangan IKM;
- 4) Belum optimalnya pengembangan industri telematika dan Tekstil dan Produk Tekstil;
- 5) Masih rendahnya daya saing produk IKM yang berorientasi ekspor dan masih tingginya tingkat ketergantungan produk bahan baku import;
- 6) Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah, dan besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten/kota.
- 7) Minimalisasi ekonomi biaya dari aspek institusi, infrastruktur, dan logistik.

c. Unit Pelayanan Teknis Technopark

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas di dalam kawasan Cimahi Technopark yang belum optimal;
- 2) Pelaksanaan aktivitas di dalam kawasan Cimahi Technopark yang cukup intens yang dilaksanakan oleh *multi stakeholders*, oleh karena itu perlu dirumuskan pola pengkoordinasian aktivitas kawasan Cimahi Technopark yang efektif baik itu yang bersifat konvensional maupun yang berbasis IT (dalam bentuk Sistem Informasi);
- 3) Optimalisasi fungsi kawasan Cimahi Technopark sebagai *hub* (penghubung) antara para *stakeholders* dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal berbasis kewirausahaan dan daya saing;
- 4) Pola diseminasi pemanfaatan hasil riset dan teknologi di dalam kawasan Cimahi Technopark yang belum terumuskan;
- 5) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 6) Pola pemanfaatan kawasan Gedung Cimahi Techno Park yang dikerjasamakan dengan masyarakat belum maksimal;

- 7) Penyediaan *desain/lay out outdoor Eye Catching* untuk menjadikan kawasan Cimahi Techno park sebagai kawasan edukasi animasi dan telematika yang mempromosikan dan mensosialisasikan IP Animasi dan Aplikasi belum maksimal;
- 8) Rambu-Rambu eksternal pengarah ke kawasan Cimahi Techno Park belum banyak dan jelas serta Rambu-Rambu Internal kawasan terkait penyediaan shelter SAKOCI belum tersedia;

Berikut adalah hambatan/kendala yang dihadapi serta tindakan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian untuk mengatasinya:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai
Tindakan : Meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya
2. Etos kerja yang belum profesional
Tindakan : Perlunya pembinaan pegawai yang efektif untuk memperbaiki etos kerja yang buruk dengan adanya *reward and punishment*
3. Belum optimalnya koordinasi antar bidang juga lintas sektoral
Tindakan : Peningkatan kesadaran untuk saling membutuhkan dan bekerjasama dalam mewujudkan visi misi Dinas dan kota

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan di Disdagkoperin

Dengan mempertimbangkan pada pencapaian kinerja pada lima tahun sebelumnya serta memperhatikan beberapa perubahan lingkungan strategis Disdagkoperin, maka ada beberapa tantangan sekaligus peluang yang dihadapi oleh Dinas ke depan. Tantangan dan peluang itu meliputi:

1. Kondisi pengembangan UKM yang belum terlalu kondusif, terutama fasilitasi dari pemerintah Kota Cimahi dalam upaya pengembangan UKM, terutama dalam hal pembinaan yang semestinya. Untuk ke depannya perlu dipikirkan program pemberdayaan UKM informal sektor perdagangan yang lemah manajerial, promosi di berbagai media, jaringan pemasaran UMK, kewirausahaan dan kemitraan, permodalan, pemanfaatan

teknologi informasi dan digitalisasi belum banyak dimanfaatkan dikalangan UMK dan akses pasar. Pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP.

2. Dalam bidang industri, perdagangan masih terlihat bahwa kondisi saat ini belum terlalu optimal upaya pengelolaan pendataan industri dan juga pelayanan data ekspor dan impor belum memadai. Selain itu, pada sektor perdagangan efisiensi perdagangan dalam negeri masih perlu diupayakan perbaikan yang serius ke depannya disamping upaya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan. Sementara pada sektor industri, pembinaan dan peningkatan kemampuan teknologi industri menjadi perhatian ke depannya. Masih banyak pasar tradisional yang belum sesuai SNI, masih terbatasnya para pelaku UMKM yang melakukan pemasaran/ *trading online* dan kerjasama dengan toko ritel modern. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Belum memanfaatkan digitalisasi dan teknologi informasi serta kerjasama antar industri hulu dan hilir. Belum sepenuhnya memenuhi amanat undang-undang khususnya yang terkait dengan Izin Usaha Industri dan Sistem Informasi Nasional (SIINas).
3. Pertumbuhan pasar tradisional perlu mendapat perhatian di tengah maraknya perkembangan pasar modern. Hal ini perlu direncanakan ke depan agar proses pengelolaan dan pelayanan di pasar tradisional akan menjadi lebih baik dan berkualitas terutama dalam aspek infrastruktur pasar yang memadai dalam rangka mendorong terciptanya pasar tradisional yang sehat dan bersih
4. Masih ada beberapa oknum pelaku usaha, terutama di sektor informal yang memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk kedepannya perlu dilakukan peningkatan kualifikasi Sumber Daya manusia Pembina serta dukungan sarana dan prasarana operasional pembinaan dan pengawasan yang memadai.
5. Tantangan dan peluang yang lainnya adalah bahwa kecenderungan perekonomian Kota Cimahi ke depan didominasi

oleh pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dan menurunnya industri manufaktur. Ini berarti adanya indikasi perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan sektor ekonomi di Kota Cimahi, yaitu dari sekunder menjadi tersier perlu dipersiapkan secara mantap dan matang. Selain itu terlihat juga bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat tidak sejalan, karena tingkat kemiskinan masyarakat masih relatif tinggi hal ini dapat dilihat dari hasil musrenbang Kota yang menyatakan bahwa kebutuhan akan sandang murah berada pada peringkat nomor satu. Oleh karena itu, strategi untuk mendongkrak kemampuan daya beli masyarakat harus dibangun dan dikembangkan. Hal tersebut dapat dilakukan ke depannya dengan menggerakkan kegiatan ekonomi yang mampu melibatkan lebih banyak sumber daya lokal dalam bentuk tenaga kerja lokal, bahan baku, kreativitas yang berasal dari pengetahuan dan budaya lokal Kota Cimahi.

2.4 Menelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang tingkat Kota Cimahi telah dilaksanakan Pada Maret 2020 dengan secara virtual melalui Aplikasi *Zoom Meeting*, tema pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021: *“Melanjutkan Pemulihan Sosial dan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera yang Didukung dengan Infrastruktur Berkelanjutan.”* yang dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah Terkait, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas, stakeholder bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian serta unsur lain yang terkait di Kecamatan/Kelurahan. Maka selayaknya usulan/keinginan masyarakat dapat tertuang ke dalam Rencana Kerja Dinas. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada dimaksimalkan keinginan dari masyarakat dapat diselaraskan dengan kebutuhan pada rencana kerja dinas guna mendukung cita-cita pembangunan Kota Cimahi.

Telaah dari usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkannya, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan perekonomian dan kemampuan daya beli masyarakat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang berbasis lokal dan berorientasi global. Artinya bahwa dinas mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang berbasis lokal dan berorientasi global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan peran masyarakat dan *stakeholders* sebagai akselerator peningkatan daya saing untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Artinya bahwa pada era globalisasi yang berkembang saat ini dimana perubahan lingkungan strategik begitu cepat dan dinamis maka potensi pelaku ekonomi harus terus didorong kapasitasnya untuk menjadi penggerak daya saing Kota Cimahi sehingga dapat mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global sekaligus dapat memenangkan pasar global untuk menuju kemandirian masyarakat Cimahi
3. Meningkatkan penggunaan produk lokal, meningkatkan kelancaran distribusi dan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Artinya bahwa pembangunan dan pengembangan pelaku ekonomi yang berbasis lokal harus didorong agar masyarakat akan mencintai dan menghargai produk sendiri, kemudian berusaha untuk meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa, melakukan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat agar roda perekonomian di Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik.
4. Peningkatan sinergisitas, kemitraan dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian secara sistematis, fokus, berkelanjutan dan terintegrasi. Artinya bahwa dengan meningkatkan sinergisitas, kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha secara sistematis, fokus, berkelanjutan dan terintegrasi, diharapkan agar produktivitas, daya saing menjadi lebih baik menuju kemandirian masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi yang begitu banyak harus dipedomani secara serius dan seksama karena pengaruhnya yang sentral dan universal terhadap sektor-sektor lainnya. Arah kebijakan yang dimaksud sebagai berikut:

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 – 2019

A. Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA)

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sebagai upaya Reformasi Birokrasi
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
- 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
 - membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya
 - meluncurkan insentif kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah;
 - meningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi;
 - membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasana dan sarana dengan teknologi terkini.

- meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
 - mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional (Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri;
 - Riset dan pengembangan dasar didukung dengan dana pemerintah
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- 9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

COMMON GOALS RPJMD TAHUN 2013-2018

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah

1. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan; dan
3. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Visi Kota Cimahi adalah **“Mewujudkan Cimahi BARU. Maju, Agamis dan Berbudaya”**. Penjabaran dari makna Visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

MAJU : Mengandung pengertian bahwa seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

AGAMIS : Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BERBUDAYA : Mengandung pengertian bahwa di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- MISI** :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
 3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA CIMAHI

1. Meningkatnya Angka Kemiskinan;
2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka; dan
3. Tingginya ketimpangan pendapatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam kerangka mewujudkan suatu organisasi publik yang berkinerja baik, sumber daya menjadi aspek yang sangat menentukan upaya perwujudannya. Disdagkoperin dalam hal ini juga sangat menyadari bahwa dalam mencapai kinerja yang baik maka pengelolaan sumber daya harus disediakan secara memadai dan dimanfaatkan secara optimal.

Sesuai dengan visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu **“MEWUJUDUKAN CIMAHI BARU. MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA”**, Disdagkoperin Kota Cimahi turut bertanggungjawab untuk mewujudkan visi tersebut sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Berdasarkan penjabaran atas misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Disdagkoperin Kota Cimahi mendukung misi ke-3.

Misi : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi.

- Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan;
3. Menurunnya kemiskinan.

Untuk memenuhi pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang mana layanan tersebut belum tercantum dalam program prioritas pembangunan RPJMD 2017-2022, maka disusunlah tujuan dan sasaran perangkat daerah antara lain:

Tujuan : Meningkatkan daya saing perdagangan

Sasaran : Meningkatnya sistem distribusi dan usaha perdagangan serta ekspor daerah

Tujuan : Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah

Sasaran : Meningkatnya UKM yang berdaya saing

Tujuan : Meningkatkan daya saing industri

Sasaran : 1. Meningkatnya dan berkembangnya produk-produk IKM
2. Terbentuk dan berkembangnya sentra industri pengolahan

Tujuan : Menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif

Sasaran : Terbentuknya sentra jasa dan perdagangan

Tujuan : Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi

Sasaran : Meningkatnya koperasi sehat

Berpijak pada keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Disdagkoperin untuk program penunjang pelayanan adalah sebagai berikut:

Strategi Sub Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:

1. Memberdayakan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
2. Mengembangkan UMKM
3. Melakukan pengawasan dan memeriksa Koperasi
4. Menilai kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian
6. Memberdayakan dan melakukan perlindungan koperasi

Strategi Sub Sektor Perdagangan

1. Memfasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan
2. Meningkatkan sarana distribusi perdagangan
3. Meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
4. Melakukan pengembangan ekspor
5. Melakukan standardisasi dan perlindungan konsumen
6. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Strategi Sektor Perindustrian:

1. Melakukan perencanaan dan pembangunan industri
2. Melakukan pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
3. Melakukan pengelolaan sistem informasi industri nasional
4. Meningkatkan sarana distribusi perdagangan

ARAH KEBIJAKAN**Arah Kebijakan Sub Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

1. Memeriksa dan Mengawasi Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Melakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
4. Memberdayakan dan Melindungi Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Memberdayakan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
5. Memberdayakan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Melakukan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
6. Melakukan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Memfasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Arah Kebijakan Sub Sektor Perdagangan

1. Melaksanakan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan. Memfasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Menerbitkan Tanda Daftar Gudang. Memfasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3. Melakukan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Menyediakan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Melakukan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya. Membina dan mengendalikan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. Memberdayakan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

5. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat. Mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
6. Mengendalikan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Melakukan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Melaksanakan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
7. Menyelenggarakan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota. Melaksanakan Pameran Dagang Nasional. Melaksanakan Pameran Dagang Lokal
8. Melaksanakan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Melakukan pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
9. Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam NegeriMelaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota. Meningkatkan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Arah Kebijakan Sub Sektor Perindustrian

1. Menyusun dan mengevaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/KotaMenyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

2. Menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Memfasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
3. Menyediakan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Memfasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
4. Menyusun dan mengevaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
5. Melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Memfasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3.3 Program dan Kegiatan

Melihat hasil evaluasi dari masing-masing bidang dan evaluasi efektifitas anggaran dan evaluasi kebutuhan yang sejalan (tidak sejalan) dengan RPJMD maka disusun program/ kegiatan akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas, RPJMD Kota Cimahi serta mengakomodir hasil masukan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil Musrenbang.

**PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									15,929,447,300				17,605,142,000
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									12,372,447,300				13,584,142,000
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									570,500,000				650,000,000
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah dokumen perencanaan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	35 Dokumen		350,500,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	400,000,000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,570,000,000					11,580,000,000
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah bulan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan		10,500,000,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	11,500,000,000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah dokumen		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen		25,000,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	30,000,000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah dokumen		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen		45,000,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	50,000,000
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								38,396,100					42,235,700
2	17	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah BMD yang diasuransikan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	100 Persen	7 Unit		38,396,100			Persentase Sarana Dan Prasarana	100 Persen	42,235,700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Semua Kelurahan							Yang Dipelihara		
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								87,120,000					95,832,000
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Non ASN yang mendapatkan BIMTEK		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	135 Orang		87,120,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	95,832,000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								640,656,000					703,721,500
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Komponen Peralatan Instalasi Listrik pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		32,477,300			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	34,725,000
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		54,997,600			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	60,497,300
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		3,941,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	4,335,100
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		139,416,800			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	153,358,500
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		217,323,300			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	239,055,600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah bulan fasillitasi koordinasi dan konsultasi		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		192,500,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	211,750,000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108,154,200					118,969,700
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		13,200,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	14,520,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		94,954,200			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	104,449,700
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								357,621,000					393,383,100
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		278,971,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	306,868,100
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		78,650,000			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	86,515,000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								117,000,000					130,000,000
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								117,000,000					130,000,000
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif	Coaching Clinic		Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	110 Angka	30 Koperasi		117,000,000			Jumlah Koperasi Aktif	110 Angka	130,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Semua Kelurahan									
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							850,000,000						935,000,000
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							850,000,000						935,000,000
2	17	4	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif	1. Jumlah koperasi aktif yang dinilai kesehatannya		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Angka	15 koperasi	850,000,000			Jumlah Koperasi Aktif	110 Angka	935,000,000	
							2. Jumlah koperasi yang diikuti sertakan penilaian untuk koperasi berprestasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 koperasi							
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							355,000,000						391,000,000
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							355,000,000						391,000,000
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	1. Jumlah kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman koperasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Angka	180 orang	355,000,000			Jumlah Koperasi Aktif	110 Angka	391,000,000	
							2. Jumlah peserta/ koperasi yang mendapatkan fasilitasi Diklat koperasi				180 orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								85,000,000					95,000,000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								85,000,000					95,000,000
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah aplikasi koperasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Angka	1 Aplikasi		85,000,000			Jumlah Koperasi Aktif	110 Angka	95,000,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								350,000,000					490,000,000
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								350,000,000					490,000,000
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha Baru	meningkatnya omset dan aset UMKM		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 WUB	19 persen		280,000,000			Jumlah Wirausaha Baru	55 WUB	410,000,000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 WUB	55 UKM		70,000,000			Jumlah Wirausaha Baru	55 WUB	80,000,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								1,800,000,000					1,980,000,000
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								1,800,000,000					1,980,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	8	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Prosentase Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Paham Aturan / Tata Tertib	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.33 Persen	500 UKM		1,800,000,000			Prosentase Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Paham Aturan / Tata Tertib	23.33 Persen	1,980,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								3,035,880,000					3,339,467,940
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								326,975,000					359,672,500
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								300,547,500					330,602,250
3	30	2	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Jumlah Sidak		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	4 kali		300,547,500			Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	330,602,250
							Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan				4 kali							
							Persentase Pormohonan Izin yang di proses				50 Persen							
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang								26,427,500					29,070,250
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Rekomendasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	25 Rekomendasi		26,427,500			Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	29,070,250
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								589,661,500					648,627,650

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								57,590,500					63,349,550
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Pembangunan yang memadai sarana perdagangan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	4 pasar		57,590,500			Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	63,349,550
3	30	03	2.01		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								532,071,000					585,278,100
3	30	03	2.01	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Jumlah Pasar Rakyat di Kota Cimahi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	8 pasar		454,823,500			Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	500,305,850
3	30	03	2.01	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Jumlah Lomba di Bidang Perdagangan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	1 Kegiatan		77,247,500			Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	84,972,250
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								547,783,500					602,561,850
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								23,595,000					25,954,500
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	Pasar Rakyat dan Toko Modern		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	10 Lokasi		8,497,500			Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	0	9,347,250
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	Jumlah Sidak yg Dilaksanakan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4 kali		15,097,500			Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	0	16,607,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							524,188,500					576,607,350	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	Jumlah Monitoring/Sidak harga Pokok		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4 kali	35,227,500			Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	0	38,750,250	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	Tiga kali Kegiatan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3 Kecamatan	488,961,000			Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	0	537,857,100	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							574,128,500					631,541,350	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							574,128,500					631,541,350	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Jumlah Pelatihan dan Pendampingan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	5 Kegiatan	189,733,500			Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	208,706,850	
							Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan				2 Kegiatan							
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	produk ukm/ikm		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	50 UKM/IKM	291,197,500			Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	320,317,250	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	produk ukm/ikm		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	10 UKM/IKM	93,197,500			Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	102,517,250	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							500,500,000					550,549,940	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							500,500,000					550,549,940	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	meningkatnya kontribusi kegiatan pelayanan dan pengawasan terhadap PAD Kota Cimahi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 Tahun	406,971,400			Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	0	447,668,540	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	meningkatnya kontribusi kegiatan pengawasan terhadap PAD Kota Cimahi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 Tahun	93,528,600			Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	0	102,881,400	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							496,831,500					546,514,650	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							496,831,500					546,514,650	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Pameran		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Pameran	439,389,500					483,328,450	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Penambahan Sarana dan Prasarana		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	57,442,000					63,186,200	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1,056,037,800					1,163,640,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							865,317,800					953,908,000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							865,317,800					953,908,000	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	dokumen perda RPIK		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 dok	85,000,000			Jumlah Sentra Industri Pengolahan	4 Angka	93,500,000	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	sentra industri		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	3 sentra	62,700,000			Jumlah Sentra Industri Pengolahan	4 Angka	68,970,000	
									Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	jumlah ikm yang mengikuti fasilitasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	100 ikm	31,350,000			Jumlah Sentra Industri Pengolahan	4 Angka	34,500,000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	fasilitasi haki		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	50 ikm	658,687,800			Jumlah Sentra Industri Pengolahan	4 Angka	726,600,000	
							fasilitasi prototipe				100 ikm							
							forum kemitraan				100 ikm							
							Pelatihan Daya saing Produk IKM Craft				50 ikm							
							Pelatihan Daya Saing Produk IKM melalui Sosmed				100 ikm							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
							pelatihan digital				30 ikm							
							Pelatihan Ergonomi				100 ikm							
							Pelatihan Good manufacturing Practice (GMP)				50 ikm							
							Pelatihan Hazat analisis ctrical control point (HACCP)				100 ikm							
							Pelatihan Managemen bahan dan persediaan				35 ikm							
							pelatihan managemen Mutu				50 ikm							
							Pelatihan peningkatan daya saing produk IKM Logam				40 ikm							
							Pelatihan TPT				45 ikm							
							Pendampingan Desiminasi teknologi dan SIM				50 ikm							
							Sosialisasi dan fasilitasi kurasi produk IKM Potensial ekspor				100 ikm							
							Sosialisasi diseminasi kebijakan industri				100 ikm							
							Sosialisasi kawasan industri sehat				100 ikm							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Sosialisasi Mutu Produk untuk kluster industri non mamin				75 ikm							
							Sosilaisasi Safeguard Measure Perlindungan Industrial Dalam Negeri				100 ikm							
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Sentra Industri Pengolahan			Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka			27,580,000			Jumlah Sentra Industri Pengolahan	4 Angka	30,338,000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								53,600,000					58,900,000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								53,600,000					58,900,000
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi IUI Kecil dan Menengah yang sesuai prosedur	presentase permohonan rekomendasi IUI yang diproses		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	100 persen		31,000,000			Jumlah Rekomenda si IUI Kecil dan Menengah yang sesuai prosedur	0	34,100,000
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi IUI Kecil dan Menengah yang sesuai prosedur	Pengawasan dan pengendalian rekomendasi ijin IUI		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	100 persen		22,600,000			Jumlah Rekomenda si IUI Kecil dan Menengah yang sesuai prosedur	0	24,800,000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								137,120,000					150,832,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							137,120,000						150,832,000	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	pemutakhiran data industri		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 kali	137,120,000				Jumlah Sentra Industri Pengolahan	4 Angka	150,832,000	
							sosialisasi dan pelaporan SIINAS				2 kali								
TOTAL													20,021,365,100						22,108,249,940

Kode			Indikator Kinerja		RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
------	--	--	-------------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------	-----------------------------------	--

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								5,278,249,570					5,806,074,527
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								5,278,249,570					5,806,074,527
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	Jumlah Calon Inkubasi Bisnis Teknologi			4 Angka	5 Calon Start Up		5,278,249,570	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Sentra Industri Pengolahan	4 Angka	5,806,074,527
							Jumlah Kegiatan Business Meeting				1 kegiatan							
							Jumlah Kegiatan Digital Business Industry/Stakeholders Pelaku UMKM yang Terlaksana di Cimahi Techno Park dan BITC				500 Kegiatan							
							Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung				12 Kali							
							Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Gedung				2 Kali							
							Jumlah Rangkaian Kegiatan Pra Inkubasi Digital Kreatif				16 Kegiatan							
							Jumlah Retribusi Gedung BITC				550000000 Rupiah							
							Jumlah Tenant Gedung BITC				25 Tenant							
TOTAL													5,278,249,570					5,806,074,527

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							4,265,622,256					4,692,184,482	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							4,265,622,256					4,692,184,482	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							4,265,622,256					4,692,184,482	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi				75 Persen			4,265,622,256			Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	4,692,184,482
TOTAL													4,265,622,256					4,692,184,482

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Renja pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dimaksud untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 oleh setiap bidang kerja. Hal ini berarti bahwa dalam pengajuan setiap kegiatan, harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tahapan-tahapan setiap tahunnya.

Akhirnya dengan kesungguhan dari semua pihak dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan agenda-agenda kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian akan sangat membantu dan menentukan bagi keberhasilannya. Semoga Rencana kerja Tahun 2021 dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja sesuai dengan visi dan misi instansi yang pada pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan.

Demikian Renja Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2021 agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Buku ini sebagai bahan acuan kegiatan lebih lanjut kegiatan Tahun 2021 dan prakiraan maju Renja di Tahun 2022 yang akan datang.

Ditetapkan di Cimahi
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan Perindustrian

DADAN DARMAWAN, S.SOS., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005